

Strategi *International Non-Governmental Organization (INGO) Rutgers World Population Foundation (WPF) Dalam Menangani Sexual and Gender Based Violence (SGBV) Terhadap Perempuan di Indonesia (2012-2016)*

(The Strategy of International Non-Governmental Organization (INGO) Rutgers World Population Foundation (WPF) in Managing Sexual and Gender based Violence (SGBV) towards Women in Indonesia 2012-2016)

Bunga Rizkia Nanda

bungarizkia.nanda89@gmail.com

Pembimbing : Dian Azmawati, S.IP., M.A.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp : (0274) 387656

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand various form of social problems, especially women's problems in the form of SGBV that occur in Indonesia. this research help to understand the roles, functions, goals, structure, and objectives of the organizations as well as the governance for women protection at Rutgers World Population Foundation (WPF). The research of this case also to explain the development case of SGBV in 2012-2016 and the efforts of Rutgers WPF in providing protection for the women victims and women in solving Indonesia.

Keywords: Rutgers WPF, SGBV, Sexual Violence, Gender, Women, Women, Indonesia

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan sosial, khususnya permasalahan perempuan berupa SGBV yang terjadi di Indonesia. penelitian ini membantu memahmai peran, fungsi, tujuan, struktur organisasi dan tata tata kelola perlindungan perempuan di Rutgers World Population Foundation (WPF). Penelitian ini juga menjelaskan perkembangan angka kasus SGBV tahun 2012-2016 dan bentuk nyata strategi Rutgers WPF dalam memberikan perlindungan terhadap korban SGBV serta menyelesaikan permasalahan perempuan di Indonesia.

Kata Kunci : Rutgers WPF, SGBV, Kekerasan Seksual, Gender, Perempuan, Indonesia

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang masih banyak dijumpai dalam berbagai pemberitaan di media massa hingga saat ini. Tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak

berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain. Kemudian orang lainlah yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan

seksual, maka Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual tersebut diantaranya yaitu perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi atau serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan (Widianingrum, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, 2017). Terdapat berbagai definisi mengenai *Gender Based Violence*. *UN Commissioner for Refugee* mendefinisikan GBV sebagai bentuk kekerasan yang ditargetkan kepada seseorang atau sekelompok orang karena gender mereka (*"Gender based violence refers to violence that targets a person or a group of persons because of gender"*). Sedangkan komite penghapusan kekerasan terhadap perempuan mengartikan dengan lebih luas, yaitu termasuk kepada tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, seksual, penderitaan, ancaman, tindakan dan paksaan serta perampasan kebebasan lainnya berdasarkan gender mereka. Kemudian UNIFEM (*United Nations Development Found for Woman*) memasukkan konteks baru dalam pendefinisian GBV, yaitu adanya unsur hubungan kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat (Yulia, *Gender Based Violence in International Relations*, 2012).

Dalam catatan Komnas Perempuan selama 12 tahun mulai dari tahun 2001 hingga 2012, setiap harinya terdapat korban kekerasan seksual sedikitnya sebanyak 35 perempuan. Kemudian tahun 2012 ada 3.937 kasus kekerasan seksual. Sebanyak 2.521 kasus kekerasan seksual tahun 2012 terjadi di ranah publik atau komunitas. Mayoritas bentuknya berupa perkosaan dan pencabulan sebanyak 1620 kasus. Sedangkan pada tahun berikutnya bertambah menjadi 5.629 kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, dapat artikan bahwa pada tahun 2013 terdapat 2

perempuan yang mengalami kekerasan seksual dalam waktu 3 jam. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun untuk remaja perempuan dan 25-40 tahun untuk perempuan dewasa. Dalam data Komnas HAM tahun 2015, terdapat 6.499 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Angka ini mengalami peningkatan dari angka tahun sebelumnya. Ditahun 2014, yang dilaporkan sebanyak 4.457. Kasus kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diketahui maupun diungkap dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Hal ini dikarenakan kasus ini selalu dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan akan dipandang rendah dan akan menjadi aib baginya apabila mengalami kekerasan seksual seperti kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan selama ini perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan. Selain itu, perempuan yang menjadi korban bahkan juga sering disalahkan karena bentuk fisik maupun gaya berpakaian yang menjadikan penyebab terjadinya kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan seksual tidak selalu memandang fisik, usia, bahkan gaya berpakaian dari seseorang. Maka, inilah yang membuat korban perempuan seringkali bungkam. (Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual, 2017).

Tentunya hal ini menjadi perhatian bagi setiap orang untuk dapat lebih memperhatikan kasus tersebut. Hubungan kekuasaan yang tidak setara, baik dalam keluarga, masyarakat bahkan negara dapat menjadikan perempuan lebih rentan mengalami kekerasan.

Seorang aktivis dan pemimpin "Pita Putih" bernama Michael Kaufman, mengatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan berkaitan dengan tiga faktor, yaitu karena adanya budaya patriarki, hak-hak istimewa (*privilege*), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (*permission*). Kekuasaan patriarki menjadi faktor pendorong dan pemicu utama dibalik kasus diskriminasi

dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena dalam budaya patriarki terjadi subordinasi dan ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu, adanya hak-hak istimewa yang dimiliki laki-laki menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya maupun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut. Sebab, sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan. Dalam ranah publik, sikap permisif (memperbolehkan) merupakan tindakan apapun yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau biasa dalam masyarakat. Sebagai contoh, kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami berupa pemukulan kepada istri. Kejadian ini masing-masing dianggap sebagai persoalan yang privat bagi segolongan masyarakat tertentu, dan dianggap lazim apabila di dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya (Noviani P., Arifah K., Cecep, & Humaedi, 2018). Maka dari itu, hal ini menjadi sangat penting bagi setiap orang untuk mengetahui Gender dimana peran ataupun tanggung jawab serta kekuasaan (power) dapat disetarakan. Sehingga di sini perempuan tidak dianggap lemah yang kemudian mudah sekali menjadi korban dari kekerasan seksual.

Salah satu lembaga yang memiliki konsen dalam isu ini adalah Rutgers WPF. Organisasi internasional ini telah bergerak sejak tahun 1997. Kemudian pada tahun 2010 ketika Rutgers WPF bergabung dengan Rutgers Nisso dan mulai beroperasi di Indonesia, nama organisasi ini berganti menjadi Rutgers WPF Indonesia. Awal penggabungan ini terbentuk dari kedua organisasi yang

memiliki cita-cita yang sama yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan menghapuskan kekerasan. Untuk memastikan organisasi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dunia termasuk Indonesia, maka Rutgers WPF Indonesia bekerja mulai dari memberikan pendidikan seksualitas komprehensif, menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai penyedia akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi, hingga menciptakan toleransi dalam keberagaman.

Rutgers WPF tidak hanya beroperasi di Indonesia. Namun, juga beroperasi di beberapa negara Asia seperti Pakistan, Afrika, Eropa dan Amerika Latin. Panduan kerja dalam Rutgers WPF mengacu pada *Cairo Programme of Action*. Panduan ini merupakan hasil dari konferensi internasional tentang populasi dan pembangunan di Kairo-Mesir tahun 1994. Hasil dalam konferensi tersebut yakni berkaitan dengan pemberdayaan remaja, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya agar menjadi subjek pembangunan yang berdaulat penuh atas tubuhnya sendiri (WPF, Tentang Kami, 2019).

Organisasi ini memiliki visi yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif (mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat luas). Di Indonesia, Rutgers WPF berusaha mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan terpenuhinya hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi yang setara dan non-diskriminatif. Terdapat empat prinsip yang mendasari visi ini, diantaranya yaitu adanya pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia, mendukung upaya untuk membangun nilai-nilai non-kekerasan, adanya sikap positif dan terbuka terhadap seksualitas dan keberagaman, serta semua kegiatan didasarkan pada data di lapangan, kepekaan pada konteks budaya, kesetaraan gender, ras atau suku, usia, agama, dan

keterlibatan aktif kelompok yang telah ditargetkan (WPF, Tentang Kami, 2019).

Ada beberapa hal yang dikembangkan dan menjadi fokus kerja dari Rutgers WPF.

1. Pendidikan seksualitas yang komprehensif

Hingga saat ini banyak ditemukan remaja yang tidak sepenuhnya mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana respon remaja yang masih tabu dalam mendengar kata “reproduksi dan seksualitas”. Padahal remaja menghadapi lingkungan yang penuh dengan risiko. Mulai dari kehamilan tidak diinginkan (KTD), sampai pada infeksi menular seksual. Untuk itu, melihat hal ini Rutgers WPF berusaha untuk ikut serta dalam mengatasi permasalahan ini. Rutgers WPF telah menyiapkan beberapa program yang saling berkaitan. Program ini berhubungan dengan pemberian pendidikan kesehatan dan seksualitas bagi remaja. Berkolaborasi dengan pendidik sekolah di SMP dan SMA, Rutgers WPF bersama-sama membekali remaja agar dapat menghindari risiko di usia dini dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Sehingga, remaja dapat menjadi agen perubahan bagi teman sebayanya (WPF, Fokus Kami, 2019). Melalui kegiatan ini, Rutgers mencoba untuk memberikan solusi untuk berbagai tantangan dan permasalahan remaja dengan memberdayakan melalui pendidikan seksualitas yang komprehensif. Seksualitas tidak hanya berbicara tentang seks, namun juga terkait dengan kesehatan, merasa nyaman dengan tubuhnya sendiri, hingga menghargai hak orang lain.

Oleh sebab itu, komprehensif yang memiliki arti menyangkut berbagai aspek mengenai manusia ini dilakukan sesuai dengan tingkatan usia kebutuhan remaja dengan berbagai pendekatan yang telah disesuaikan dan di bentuk secara kreatif. Maka dari itu, penting untuk mengemas pengetahuan secara menarik agar remaja dapat memiliki kemauan untuk mengetahui dan mempelajari hal tersebut. Sehingga, pada akhirnya mampu mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku remaja menjadi berorientasi kepada kesehatan dan menghargai orang lain. Remaja perlu mendapatkan pendidikan terkait dengan reproduksi dan seksualitas yang

komprehensif. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan pengetahuan yang dimiliki remaja tentang berbagai bahaya yang dapat merusak masa depan. Ditunjukkan dari angka statistik oleh Badan Narkotika Nasional mengatakan bahwa, di Indonesia ada lebih dari 800 ribu remaja menjadi pecandu narkoba. Jumlah ini akan lebih besar untuk saat ini karena masyarakat menyambut baik kebijakan pemerintah yang membuka diri terhadap pelaporan dari masyarakat tentang identitas para pecandu narkoba tanpa memberitahukan risiko penangkapan kepada si pecandu, melainkan langsung merekomendasikan upaya rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Demikian halnya dengan kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Sekitar 50% , remaja dan dewasa muda (berusia 15 sampai 29 tahun) hidup dengan HIV. Kemudian, kehamilan tidak diinginkan (KTD) juga terjadi pada remaja, demikian halnya dengan berbagai tindakan pengguguran kandungan (aborsi) yang tidak aman juga bisa memicu kematian. Beberapa kasus tersebut tentunya dibutuhkan dedikasi yang kuat untuk mengatasinya. Sehingga faktor inilah yang mendorong Rutgers WPF Indonesia menjalankan strateginya. Selain itu, mengingat bahwa di Indonesia jumlah remaja berkisar 25% dari jumlah penduduk. Itu artinya jumlah remaja di Indonesia hampir mencapai angka 50 juta orang (WPF, Fokus Kami, 2019) .

Rutgers dalam memberikan pendidikan yang komprehensif melibatkan pendidik sekolah seperti guru dan pembina organisasi remaja sebagai jalan dan pintu masuk untuk menjangkau para remaja. Rutgers WPF telah mengembangkan program pengembangan kapasitas guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan para pembina organisasi remaja selama lebih dari 10 tahun. Pada tahun 2014, terdapat 230 orang guru telah berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan di beberapa provinsi, seperti provinsi Jambi, DKI Jakarta, Lampung dan DIY. Dalam mengembangkan kapasitas bidang kesehatan reproduksi dan seksualitas khususnya berkaitan dengan remaja, sebanyak 337 orang pendidik dari beberapa provinsi tersebut menjadi partisipan.

Selama 2014, program Rutgers WPF ini telah melibatkan 14.219 orang remaja dari sekolah bahkan komunitas organisasi remaja. Ada beberapa modul yang telah dibuat dan digunakan dalam program, diantaranya adalah Modul Semangat Dunia Remaja (SETARA) yang digunakan dalam program pengembangan kapasitas guru. Modul ini diperuntukkan bagi guru dan pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian terdapat juga modul pendidikan kesehatan dan modul pelatihan DAKU (Dunia Remajaku Seru) yang di siapkan bagi guru dan pendidik Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu Rutgers WPF juga bekerjasama dengan pemerintah. Hal ini bertujuan agar program pendidikan seksualitas dapat dimasukkan dalam kebijakan pemerintah terkait panduan atau kurikulum sekolah. Sehingga, dapat mewujudkan lebih banyak remaja yang paham pengetahuan dan perilaku yang sehat serta menghargai orang lain (WPF, Fokus Kami, 2019).

2. Kekerasan Berbasis Gender

Dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan, pemerintah, dan beberapa lembaga donor, hingga berbagai organisasi sosial yang ada di masyarakat telah banyak melakukan intervensi. Namun program intervensi tersebut masih banyak menjadikan perempuan sebagai fokus utama dan belum menjangkau sepenuhnya kepada kelompok yang kerap melakukan kekerasan. Intervensi program masih belum dapat melibatkan lebih jauh laki-laki untuk dapat terlibat. Rutgers WPF Indonesia telah dan sedang berusaha menjalankan program-program pemberdayaan remaja dan perempuan serta meningkatkan kemampuan guru-guru pendidik, selain itu juga sebagai penyedia layanan dan para orang tua dalam menanggulangi kekerasan, serta melibatkan laki-laki dalam menjalankan strateginya yang diwujudkan dalam berbagai program. Sementara itu, masyarakat dalam memandang nilai dan budaya yang ada di Indonesia masih belum sepenuhnya mendukung perubahan yang sedang diupayakan oleh Rutgers WPF Indonesia dan mitra-mitra kerjanya. Kekerasan seolah sudah menjadi keseharian dalam hidup dan perlu proses untuk menghapusnya. Apalagi kekerasan yang terjadi di dalam rumah

terjadi justru menjadi hal yang lazim. Bermula dari hal inilah, organisasi ini kemudian berusaha mendorong penghapusan kekerasan dan mewujudkan kesetaraan gender dalam dua ranah. Pertama, mendukung pembentukan dan implementasi kebijakan pemerintah yang terkait kesetaraan gender, adanya aturan untuk melarang kekerasan dalam rumah tangga, dan aturan tentang perlindungan anak dari yang merugikan hingga menyakiti anak seperti adanya tindakan kekerasan, kemudian aturan yang melarang tentang tindak kejahatan seksual seperti pelecehan seksual dan perkosaan. Kedua, di ranah masyarakat dengan menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya penghapusan kekerasan melalui pendidikan publik, kampanye, pelibatan kelompok ayah hingga remaja laki-laki. Dalam hal ini, Rutgers WPF melibatkan kelompok laki-laki dalam program *Prevention+* untuk lebih peduli. Program ini merupakan kelanjutan dari program *MenCare+* yang memiliki fokus pada pencegahan kekerasan berbasis gender dengan memadukan melibatkan kelompok laki-laki. Tujuan dari adanya program ini yaitu untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagai suatu kondisi yang sesuai bagi pemenuhan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) dan mengungkap norma-norma gender yang masih salah diartikan dalam masyarakat (WPF, Fokus Kami, 2019). Dalam kondisi ini, diharapkan tidak ada lagi dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan khususnya kepada perempuan. Program yang berjalan tahun 2016-2020 ini, dalam implementasinya juga menggandeng beberapa mitra lokal, seperti Yayasan Pulih, Rifka Annisa, Damar, dan Rahima.

NGO ini juga Mendukung *Women Crisis Center (WCC)*. Beberapa program Rutgers WPF bersifat mencegah. Selain itu, juga bersifat mengurangi potensi bahaya terkait prinsip kesetaraan gender yang masih sering diabaikan dan bahaya yang mengancam hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Sementara, program yang lainnya yaitu berupaya mempercepat sosialisasi pentingnya hak-hak perempuan baik ibu dan remaja perempuan, yang notabene hak-hak tersebut sudah dilindungi undang-undang (WPF, Fokus Kami, 2019).

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang membenarkan adanya kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan penafsiran keagamaan yang sempit. Suatu terobosanpun oleh *Crisis Center* (Cahaya Perempuan) di provinsi Bengkulu untuk mencegah praktik kekerasan dalam rumah tangga. WCC Cahaya Perempuan bekerjasama dengan kantor kementerian agama dalam mengadakan program pembinaan bagi calon pengantin. Tentunya tentang isu kesetaraan gender dan bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Selain itu, Rutgers WPF juga terdapat konseling bagi korban dan pelaku kekerasan. Konseling dilakukan secara pribadi atau orang per orang. Sama halnya dengan konseling yang dilakukan seorang dokter kepada pasiennya. Obat yang diberikan boleh sama tetapi dosisnya bisa berbeda. Fasilitas konseling disediakan untuk pasangan suami istri, perempuan korban kekerasan, laki-laki pelaku kekerasan hingga remaja. Dengan adanya konseling ini diharapkan dapat mengubah pandangan terkait kekerasan, sehingga dapat menghindari kecenderungan terhadap perilaku ini. Secara spesifik, organisasi internasional ini memperjuangkan kesetaraan gender sebagai suatu *necessary condition* (atau kondisi yang harus ada terlebih dahulu) untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan. Rutgers WPF Indonesia berusaha secara tetap untuk mengakomodasi aspek-aspek pendekatan yang komprehensif. Mulai dari tindakan pencegahan dengan pengetahuan, kemudian pelayanan hingga penyembuhan, dan perubahan maupun perbaikan perilaku (WPF, Fokus Kami, 2019).

3. Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Melalui pemenuhan hak atas kesehatan seksual dan reproduksi, Rutgers WPF Indonesia memiliki program yang tujuannya membangun manusia Indonesia. Program tersebut adalah *Get Up Stand Out* (GUSO). Kegiatan utama dalam program ini salah satunya adalah mengembangkan layanan-layanan yang ramah remaja pada puskesmas atau klinik yang berkaitan dengan kesehatan seksual

dan reproduksi. Ukuran keberhasilan dari program ini dilihat dari kelengkapan layanan, mutu layanan dan kepuasan klien. Selain itu, optimalisasi penggunaan fasilitas layanan seperti banyak tidaknya remaja yang datang berkunjung untuk mendapatkan layanan juga menjadi ukuran keberhasilan program (WPF, Fokus Kami, 2019).

4. Keberagaman Seksual dan Gender

Minoritas seksual, yang tidak sesuai dengan norma heteroseksual dan gender yang dominan, sering dihadapkan pada marginalisasi, stigmatisasi, diskriminasi, dan bahkan kriminalisasi. Ini memengaruhi kesejahteraan dan kesehatan mereka, dan membatasi akses mereka ke layanan, informasi, dan dukungan kesehatan seksual. Membuat program dan layanan lebih inklusif. Di banyak bagian dunia, orang LGBT menghadapi stigma, diskriminasi, dan bahkan kriminalisasi, dan tidak memiliki atau hanya akses terbatas ke informasi atau layanan kesehatan HIV dan HKSAR yang sesuai. Meskipun banyak organisasi SRHR merasa simpatik terhadap prinsip orang LGBT yang pantas mendapatkan perlakuan yang sama, pengalaman dan kapasitas teknis mereka seringkali terbatas. Rutgers WPF berpendapat, setiap penyedia SRHR harus mengetahui dan dapat berbicara secara non-judgemental tentang *Sexual Orientation and Gender Identity* (SOGI) untuk memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang afirmatif dan inklusif.

Dalam program UFBR 2011 - 2015 dari Aliansi SRHR Belanda, Rutgers dan beberapa negara aliansi SRHR menjalankan program untuk mendukung mitra dalam negeri dan organisasi LGBT, dalam upaya mereka untuk mengatasi dan mengarusutamakan keragaman seksual dan gender dalam konteks homofobia, transphobia dan kriminalisasi. Praktik dan strategi terbaik untuk mengarusutamakan keragaman seksual dan gender ke dalam program dan layanan dieksplorasi dan dievaluasi di Indonesia, Kenya, Malawi, dan Tanzania.

Dimulai ketika APA (*American Psychiatric Association*) melakukan penelitian terhadap orientasi seksual homo, pengakuan hak asasi manusia LGBT mulai diakui. Hasil penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa homo maupun orientasi seksual non hetero lain bukanlah sesuatu hal yang abnormal. Bukan suatu bentuk penyimpangan psikologis dan juga bukan sebuah penyakit. Setelah penelitian tersebut, APA mencabut homoseksual dari salah satu daftar penyakit kejiwaan pada tahun 1974. Kemudian WHO mengadopsi ketetapan dan diikuti oleh Departemen Kesehatan RI pada tahun 1983. Sejak itu, homoseksualitas diakui sebagai suatu bentuk orientasi seksual dan hak-hak dasarnya dinyatakan dalam berbagai dokumen HAM internasional, nasional, dan regional. Seperti dokumen internasional HAM *The Yogyakarta Principles* yang disepakati oleh 25 negara pada tahun 2007 di Yogyakarta. Dokumen tersebut menjelaskan adanya perlindungan HAM terhadap kelompok LGBTIQ dimana semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Setiap manusia memiliki sifat universalnya yaitu saling bergantung, tidak dapat dibagi, dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu. Menyatu dalam hal ini adalah menyatu dengan martabat manusia. Sehingga hal ini tidak boleh menjadi dasar adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Dari sini dapat dilihat bahwa sudah seharusnya negara mengemban tanggung jawab untuk menjamin hak dan perlindungan kepada LGBTIQ, sebagaimana negara menjamin hak dan perlindungan kelompok heteroseksual. Namun, hingga saat ini kelompok tersebut belum sepenuhnya diterima di Indonesia. Masih ada hukum nasional seperti perda-perda syariah yang menganggap hal tersebut tidak sejajar dengan proposisi etis di Indonesia. Maka dari itu, hal ini perlu didialogkan kembali dan dikaji ulang agar program Rutgers WPF dapat berjalan baik sesuai kondisi maupun penempatan nilai-nilai di Indonesia.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang didapat adalah “Bagaimana Strategi Rutgers WPF dalam menangani *Sexual and Gender based Violence (SGBV)* terhadap perempuan di Indonesia”

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Konsep Feminisme dan Teori Advokasi.

1. Konsep Feminisme

Feminisme dalam bahasa latin yaitu *femina* yang berarti perempuan. Istilah ini tertuju pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta sebuah gerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan yang mulai digunakan pada tahun 1890-an (Azis A. , 2007). Feminisme berusaha untuk menyadari adanya kedudukan yang rendah pada perempuan di dalam masyarakat. Sehingga terdapat keinginan untuk memperbaiki dengan mengubah keadaan tersebut.

Secara garis besar, terdapat 3 aliran feminisme.

a. Feminisme Liberal.

Feminisme Liberal lahir pertama kali pada abad ke-18. Tokoh dalam feminisme ini diantaranya yaitu Mary wollstonecrat (1759-1799) dengan tulisannya *A Vindication of the Right of Women* , kemudian pada abad ke-19 yaitu John Stuart Mill dengan bukunya *Subjection of Women* dan Harriet Taylor Mills daengan bukunya *Enfranchisemen of Women*, hingga pada abad 20 Betty Friedan dalam *The Feminis Mistique* dan *The second Stage*. Para feminis liberal mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal dimana pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan serta rasionalitas yang sama, dimana ada dua aspek dalam rasionalitas yaitu moralitas berkenaan dengan *decision maker* dan prudensial atau pemenuhan terhadap kebutuhan sendiri (Ihromi T. , 1995).

Para penganut feminisme liberal berpendapat bahwa seperti halnya laki-laki, perempuan mampu untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan moralitas mereka.

Dalam hal ini berarti perempuan adalah makhluk yang rasional. Seperti laki-laki yang juga mempunyai hak untuk ikut serta dalam kehidupan politik, perempuan dapat memberikan sumbangan pada perdebatan tentang isu-isu politik, sosial, dan moral (Sulaiman, 2014). Ciri utama dari gerakan feminisme adalah adanya pelibatan perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*). Semua aksi dan pergerakan dalam aliran ini pada akhirnya memberikan ruang kosong dan kebebasan bagi keterlibatan kelompok perempuan dalam segala aspek kehidupan.

b. Feminisme Sosialis

Dalam Feminis sosialis lebih menekankan aspek gender dan ekonomis dalam kedudukan atas kaum perempuan. Dalam pandangan Marx dan “kelas sosial”, perempuan dilihat sebagai penghuni kelas ekonomi. Artinya, perempuan sebenarnya telah menampilkan pelayanan berharga bagi kapitalisme. Dalam hal ini perempuan sebagai pekerja maupun istri yang tidak menerima upah atas pekerjaan domestiknya. Dalam sistem kapitalis, perempuan digambarkan pada posisi rendah dalam struktur ekonomi, sosial, dan politik, serta ditambah adanya analisis patriarki yang memusatkan segala aspek pada laki-laki (Rokhmansyah, Pengantar Gender & Feminisme, 2016). Untuk itu, munculah tuntutan feminis sosialis untuk tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam pemberian upah dan kesempatan bagi perempuan untuk dapat cuti kerja sesuai dengan kebutuhan, seperti cuti hamil dan masa menyusui anak. Jadi fokus dalam feminisme sosialis ini adalah kapitalisme dan patriarki dimana

perempuan ditempatkan pada posisi tidak istimewa.

c. Feminisme Postmodern

Walt (1998) menyatakan posmodernisme adalah salah satu tradisi dalam Hubungan Internasional yang paling berpengaruh dari akhir 1990-an sampai awal 2000-an (Weber, *International Relations Theory, A Critical Introduction*, 2005). Posmodernisme mempunyai arti ‘*after modernity*’ atau pasca modernitas. Oleh sebab itu posmodernisme erat kaitannya dengan modernitas. Beberapa tokoh dari posmodernisme diantaranya adalah Jacques Derrida, Michel Foucault, dan Jean-Francois Lyotard. Terdapat empat poin penting yang ditekankan dalam pemikiran kaum posmodernis (Devetak, *Postmodernism in Theories of International Relations*, 2001). Pertama, keterkaitan antara kekuatan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) dalam studi Hubungan Internasional. Pemikiran dari Michel Foucault menjadi salah satu pemikiran yang paling berpengaruh dalam posmodernisme ini. Foucault mengemukakan bahwa *knowledge* (ilmu pengetahuan) dan *power* saling mempengaruhi dan keduanya saling menguatkan satu sama lain (Devetak, *Postmodernism in Theories of International Relations*, 2001). Sejalan dengan Foucault, Jackson dan Sorensen (2005) juga beranggapan bahwa pengetahuan dapat meluas dan meningkat, dengan demikian kemampuan manusia dalam hal penguasaan juga ikut meningkat. Tidak hanya atas dunia alam namun juga dunia sosial termasuk sistem internasional. Konsep yang menjadi pemikiran historis dalam membahas tentang signifikansi dalam hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan ialah

konsep genealogi. Konsep ini memberikan benang merah antara klaim terhadap ilmu pengetahuan dengan klaim terhadap *power* dan otoritas. Dengan kata lain, sebuah *power* dapat memberentuk *knowledge*. Kedua, adanya pendekatan tekstual dalam posmodernisme. Derrida mengatakan bahwa '*there is nothing outside the text*' dimana kaum posmodernis ini tak hanya memandang teks sebagai tulisan belaka (Brown, *Critical Theory and Postmodernism in International Relations in A.J.R. Groom & Margot Light* (eds), *Contemporary International Relations: A Guide to Theory*, 1994). Ini merupakan kumpulan fenomena yang dapat dipahami dan kaji lebih lanjut sehingga hal tersebut dapat ditata ulang. Oleh karenanya dibutuhkan suatu *double reading*. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana selalu ada lebih dari satu pembacaan dari teks apapun. Ketiga, pemaknaan negara dan entitasnya dalam feminisme postmodern dimana negara, kedaulatan, dan kekerasan adalah pembahasan yang tak pernah berhenti dibahas dalam studi Hubungan Internasional. Keempat, upaya posmodernisme untuk kembali memikirkan tentang pemahaman masyarakat terkait politik. Sebelum dikonstruksikan oleh postmodernisme, implikasi utama dari keadaan dunia salah satunya adalah, gambaran politik masyarakat yang semakin miskin. Maka, ini seolah menjadikan pemahaman tentang dinamika politik dunia dibatasi.

Melihat beberapa aliran yang ada, Rutger WPF merupakan sebuah gerakan sosial yang mengarah pada aliran Femisme liberal dan Sosialis. Hal ini dikarenakan dalam berjuang menangani SGBV terhadap perempuan di Indonesia, NGO ini

berpegang atas dasar adanya kebebasan hak setiap individu. Seperti hak untuk mengembangkan kapasitas intelektual & moralitas, dan ikut serta dalam pembangunan dan kehidupan politik. Dalam memenuhi hak tersebut, Rutgers WPF menjalankan beberapa program pemberdayaan perempuan baik remaja maupun dewasa, kemudian meningkatkan kemampuan guru-guru pendidik, sebagai penyedia layanan, dan pemberian sosialisasi untuk para orang tua dalam menanggulangi kekerasan. Sebagai contoh dengan memberikan pendidikan tentang seksualitas yang komprehensif bagi anak dan remaja dengan melibatkan guru dan orang tua. Seperti pengajaran modul SETARA dan diskusi komunitas reguler untuk laki-laki dan perempuan baik remaja maupun dewasa dalam program *Prevention+*, serta mengajak masyarakat untuk turut ikut aktif dalam mengkampanyekan isu HKSR dalam program *Dance4life* maupun SGBV dalam peringatan hari-hari penting seperti Hari Perempuan Sedunia.

Selain itu, Rutgers WPF dalam implementasi programnya memiliki tujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan dengan pelibatan laki-laki untuk meningkatkan partisipasi perempuan. Seperti dalam program *MenCare+* yang melibatkan laki-laki sebagai aktor perubahan. Selama ini perempuan selalu ditempatkan di dalam rumah untuk mengurus anak hingga tidak di perbolehkan bekerja. Perempuan dianggap lemah dan selalu mengedepankan perasaan. Sehingga sering kali dinomorduakan bahkan ditempatkan pada posisi yang rendah di dunia kerja. Maka program ini dijalankan agar laki-laki dapat mengubah pandangan kesehariannya, dari diskriminatif terhadap perempuan hingga lebih menghargai relasi, bersikap adil, dan mendukung kesetaraan.

2. Teori Advokasi

Advokasi merupakan upaya untuk merubah bahkan memperbaiki

kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan seseorang atau kelompok yang menginginkan dan menekankan terjadinya perubahan tersebut.

Kata advokasi berasal dari bahasa Inggris *to advocate* yang dapat berarti 'membela' (*to defend*), 'memajukan' atau 'mengemukakan' (*to promote*), berusaha 'menciptakan' yang baru (*to create*), atau dapat pula berarti melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Sehingga, tujuan dari advokasi yaitu adanya perubahan terhadap kebijakan publik (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013).

Kegiatan advokasi harus menempuh beberapa proses diantaranya yaitu :

1. Proses legislasi dan yudikatif yang meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang (*legal drafting*) sesuai dengan system ketatanegaraan yang berlaku. Mulai dari pengajuan gagasan usul terkait perlunya undang-undang baru, perdebatan di parlemen tentang sebuah gagasan, pembentukan kelompok kerja dalam parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal (*academic draft*), penyajian naskah akademik kepada pemerintah, pengajuan kembali ke parlemen sampai pada akhirnya disepakati atau disetujui dalam pemungutan suara di parlemen.
2. Proses politik dan birokrasi yang diwarnai oleh proses-proses politik dan manajemen kepentingan antara kelompok yang terlibat didalamnya, seperti *lobbying*, negosiasi, tawar-menawar, dan kolaborasi.
3. Proses sosialisasi dan mobilisasi yang meliputi semua bentuk kegiatan dan pembentukan

pendapat umum serta tekanan masa (*political pressure*) yang terorganisir, seperti kampanye, penggalangan dukungan, diskusi, seminar, pelatihan, hingga ke pengarahannya seperti unjuk rasa, mogok, baikot, dan blokade (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013, hal. 14)

Kegiatan advokasi yang dilakukan ditingkat lokal, nasional, maupun internasional dalam prosesnya melibatkan berbagai pihak seperti komunitas atau organisasi. Didalam advokasi banyak pihak (kelompok-kelompok aksi) yang terlibat. Seperti pihak yang bertindak sebagai pencetus atau memelopori advokasi, selain itu ada pihak yang melakukan mobilisasi massa, pihak sebagai penyedia data, pihak sebagai penyedia dana, pihak yang terlibat dalam proses legislasi maupun pihak sebagai juru bicara dan *lobbying* yang akan membentuk sebuah *networking* dari gerakan advokasi.

Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink menulis buku yang sangat berpengaruh yaitu *Activists Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics* untuk menjelaskan sifat dan perilaku TANs. E. Keck dan Sikkink mengelompokkan strategi advokasi ini dalam *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*.

- a. Strategi *information politics* merupakan strategi yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menyediakan data bagi masyarakat serta mendramatisir fakta melalui bagai pernyataan-pernyataan korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian. Rutgers WPF dalam hal ini melakukan pendataan dari berbagai sumber dan mengadakan penelitian muda untuk memperoleh bukti yang sesuai

- dengan kejadian yang ada di lapangan.
- b. Strategi *symbolic politics* dilakukan dengan mengadakan ceremony, peringatan kejadian atau hari-hari istimewa yang terkait dengan isu yang diperjuangkan sehingga masyarakat memperhatikan isu tersebut. Rutgers WPF dalam strategi menjalankan perannya selalu melibatkan sebuah aksi sebagai bentuk dukungan dalam memperingati hari-hari penting seperti Hari Perempuan Sedunia, Hari AIDS Sedunia, dan peringatan lainnya yang berkaitan dengan fokus NGO ini.
 - c. Strategi *leverage politics* ialah strategi untuk memperkuat dan memperluas jaringannya serta melibatkan dukungan dengan cara menggandeng organisasi internasional maupun mitra lokal yang memiliki *power* lebih besar dan aktor yang lebih kuat. Rutgers WPF dalam implementasi program tidak berjalan secara individu, melainkan selalu menggandeng mitra dan jaringan kerja, seperti Yayasan Pulih, Rifka Anisa, Rahima, Damar, PKBI, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, hingga UNFPA. Selain itu, untuk memperkuat daya dan dukungan kepada pemerintah, Rutgers WPF juga berpartisipasi aktif bersama mitra dalam mendukung kinerja dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan dan perhatian terhadap persoalan terkait HKSR dan SGBV.
 - d. Strategi *accountability politics* adalah sebuah strategi yang dilakukan dengan mengingatkan kepada pemerintah agar dapat dengan bijak mempertanggungjawabkan sebuah kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Rutgers WPF sebagai gerakan sosial juga melakukan pemantauan atau

monitoring dan evaluasi (monev) atas dukungan yang telah diberikan pemerintah terhadap program yang berjalan. Monev yang dilakukan seperti monitoring pengajaran modul SETARA ke sekolah yang telah diberikan modul tentang seksualitas untuk siswa SMP.

Hasil Penelitian

Rutgers World Population Foundation (WPF) yang merupakan anggota International Planned Parenthood Federation ini telah bekerja secara nasional dan internasional dengan menggabungkan kekuatan dari organisasi tempat ia berasal dengan berfokus pada tiga pilar yang saling berkaitan dalam pekerjaannya. Diantaranya yaitu implementasi program, penelitian, dan advokasi.

Saat ini Rutgers WPF menekankan pada aspek kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan untuk remaja dan perempuan di lebih dari 15 negara, terutama terutama pada negara-negara yang bersinggungan dengan isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dan kekerasan terhadap perempuan. Menumbuhkan kepedulian dan membangun dunia yang terbebas dari segala bentuk kekerasan bagi remaja dan perempuan agar hidup secara terhormat dan aman, menciptakan dunia yang layak bagi remaja dan perempuan tanpa terkecuali di seluruh dunia.

Rutgers WPF memiliki harapan yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menghapuskan kekerasan. Hal ini terlihat dari program dan kebijakan Rutgers WPF yang dimulai dengan berfokus pada sebagian besar remaja yang kurang dalam pemenuhan HKSR dan perempuan yang setiap tahunnya ditemukan mengalami bentuk kekerasan, serta suatu kelompok marginal yang mengalami diskriminasi.

Melihat beberapa kasus SGBV yang ada di Indonesia dengan angka yang terus bertambah disetiap tahunnya, maka NGO

ini menaruh perhatiannya untuk dapat ikut serta dalam menangani kasus SGBV yang ada di Indonesia. Rutgers WPF bekerja demi masa depan dimana generasi muda memiliki haknya untuk memilih terkait kesehatan reproduksi dan kehidupannya. Dengan pendekatan berbasis hak dan prinsip kesetaraan gender, untuk mewujudkan perannya Rutgers WPF telah menjalankan strategi dan perannya sebagai organisasi internasional dalam menangani SGBV terhadap di Indonesia melalui :

A. Implementasi Program yang Mengarah pada Aliran Feminisme Liberal dan Sosialis

Melihat beberapa aliran yang ada, Rutgers WPF merupakan sebuah gerakan sosial yang mengarah pada aliran feminisme liberal dan Sosialis. Hal ini dikarenakan dalam berjuang menangani SGBV terhadap perempuan di Indonesia, NGO ini berpegang atas dasar adanya kebebasan pada hak setiap individu sebagaimana berdasarkan pemikiran dalam feminisme Liberal dimana pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama. Seperti hak untuk mengembangkan kapasitas intelektual & moralitas, dan ikut serta dalam pembangunan dan kehidupan politik. Dalam memenuhi hak tersebut, Rutgers menjalankan program-program pemberdayaan remaja dan perempuan dan meningkatkan kemampuan guru-guru, pendidik, penyedia layanan, dan para orang tua dalam menanggulangi kekerasan. Sebagai contoh dengan memberikan pendidikan tentang seksualitas yang komprehensif bagi anak dan remaja dengan melibatkan guru dan orang tua. Seperti pengajaran modul SETARA dan diskusi komunitas reguler untuk laki-laki dan perempuan baik remaja maupun dewasa dalam program *Prevention+*, serta mengajak masyarakat untuk turut aktif dalam mengkampanyekan isu HKSAR dalam program *Dance4life* maupun SGBV

dalam peringatan hari-hari penting seperti Hari Perempuan Sedunia.

1. Program Pendidikan Seksualitas yang Komprehensif

Pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas pada remaja masih belum tersentuh secara menyeluruh. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana respon remaja yang masih tabu dalam mendengar kata “reproduksi dan seksualitas”. Padahal remaja menghadapi lingkungan yang penuh dengan risiko. Mulai dari kehamilan tidak diinginkan (KTD), sampai pada infeksi menular seksual. Untuk itu, melihat hal ini Rutgers WPF berusaha untuk ikut serta dalam mengatasi permasalahan ini., Rutgers WPF telah menyiapkan beberapa program yang saling berkaitan. Program ini berhubungan dengan pemberian pendidikan kesehatan dan seksualitas bagi remaja. Berkolaborasi dengan pendidik sekolah di SMP dan SMA, Rutgers WPF bersama-sama membekali remaja agar dapat menghindari risiko di usia dini dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Sehingga, remaja dapat menjadi agen perubahan bagi teman sebayanya. Melalui kegiatan ini, Rutgers mencoba untuk memberikan solusi untuk berbagai tantangan dan permasalahan remaja dengan memberdayakan melalui pendidikan seksualitas yang komprehensif. Seksualitas tidak hanya berbicara tentang seks, namun juga terkait dengan kesehatan, merasa nyaman dengan tubuhnya sendiri, hingga menghargai hak orang lain.

Oleh sebab itu, komprehensif yang memiliki arti menyangkut berbagai aspek mengenai manusia ini dilakukan sesuai dengan

tingkatan usia kebutuhan remaja dengan berbagai pendekatan yang telah disesuaikan dan di bentuk secara kreatif. Maka dari itu, penting untuk mengemas pengetahuan secara menarik agar remaja dapat memiliki kemauan untuk mengetahui dan mempelajari hal tersebut. selain sehingga, pada akhirnya mampu mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku remaja menjadi berorientasi kepada kesehatan dan menghargai orang lain. Remaja perlu mendapatkan pendidikan terkait dengan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan pengetahuan yang dimiliki remaja tentang berbagai bahaya yang dapat merusak masa depan. Ditunjukkan dari angka statistik oleh Badan Narkotika Nasional mengatakan bahwa, di Indoensia ada lebih dari 800 ribu remaja menjadi pecandu narkoba. Jumlah ini akan lebih besar untuk saat ini karena masyarakat menyambut baik kebijakan pemerintah yang membuka diri terhadap pelaporan dari masyarakat tentang identitas para pecandu narkoba tanpa memberitahukan risiko penangkapan kepada si pecandu, melainkan langsung merekomendasikan upaya rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Demikian halnya dengan kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Sekitar 50%, remaja dan dewasa muda (berusia 15 sampai 29 tahun) hidup dengan HIV. Kemudian, kehamilan tidak diinginkan (KTD) juga terjadi pada remaja, demikian halnya dengan berbagai tindakan pengguguran kandungan (aborsi) yang tidak aman juga bisa memicu kematian. Beberapa kasus tersebut tentunya

dibutuhkan dedikasi yang kuat untuk mengatasinya. Sehingga faktor inilah yang mendorong Rutgers WPF Indonesia menjalankan strateginya. Selain itu, mengingat bahwa di Indonesia jumlah remaja berkisar 25% dari jumlah penduduk. Itu artinya jumlah remaja di Indonesia hampir mencapai angka 50 juta orang.

Rutgers dalam memberikan pendidikan yang komprehensif melibatkan pendidik sekolah seperti guru dan pembina organisasi remaja sebagai jalan dan pintu masuk untuk menjangkau para remaja. Rutgers WPF telah mengembangkan program pengembangan kapasitas guru Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan para pembina organisasi remaja selama lebih dari 10 tahun. Pada tahun 2014, terdapat 230 orang guru telah berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan di beberapa provinsi, seperti provinsi Jambi, DKI Jakarta, Lampung dan DIY. Dalam mengembangkan kapasitas bidang kesehatan reproduksi dan seksualitas khususnya berkaitan dengan remaja, sebanyak 337 orang pendidik dari beberapa provinsi tersebut menjadi partisipan. Selama 2014, program Rutgers WPF ini telah melibatkan 14.219 orang remaja dari sekolah bahkan komunitas organisasi remaja. Ada beberapa modul yang telah dibuat dan digunakan dalam program, diantaranya adalah Modul Semangat Dunia Remaja (SETARA) yang digunakan dalam program pengembangan kapasitas guru. Modul ini diperuntukkan bagi guru dan pendidik Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian terdapat juga modul

pendidikan kesehatan dan modul pelatihan DAKU (Dunia Remajaku Seru) yang di siapkan bagi guru dan pendidik Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian terdapat juga modul pendidikan kesehatan dan modul pelatihan DAKU (Dunia Remajaku Seru) bagi guru dan pendidik Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu ada modul LANGKAH PASTIKU (modul untuk kelompok difabel), modul SERU! (modul untuk penghuni lapas anak). *Dance 4 Life* (modul untuk mengaktifkan peran remaja) SobatASK (portal belajar online).

Kesadaran akan pentingnya memberikan pendidikan seksual pada remaja dinilai masih sangat minim hal ini dilihat dari fakta yang terjadi dalam masyarakat. Masih banyak ditemukan orangtua yang masih menganggap tabu ketika harus membicarakan tentang seks dengan anaknya. Apalagi ditambah dengan belum tersedianya layanan pendidikan HKSR yang komprehensif dan berkelanjutan di sekolah. Untuk itu, Rutgers WPF Indonesia bersama dengan PKBI DIY mengembangkan sebuah Program SETARA (Semangat Dunia Remaja) melalui modul untuk dapat memberikan bekal kepada remaja sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) khususnya, tentang seksualitas. Program ini tidak hanya melibatkan remaja sebagai peserta didik tapi juga guru serta elemen sekolah lainnya guna menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja di tingkat SMP.

Untuk Pembelajaran Modul SETARA dilakukan dua tahap, yaitu pada kelas 7 (kelas 1 SMP)

dan kedua adalah kelas 8 (kelas 2 SMP). Materi modul berisi 15 bab yang saling berkaitan, seperti :

1. Dunia Berawal dari Saya
2. Perubahan Emosi
3. Apakah Tubuhmu Berubah
4. Hubungan Sehat dan bertanggung Jawab
5. Gender
6. Perjuangkan Hakmu
7. Seksualitas dan Cinta
8. Kehamilan
9. Lindungi Dirimu dari IMS
10. HIV dan AIDS
11. NARKOBA
12. Cinta Tak Seharusnya Menyakiti
13. Masa Depan dan Rencananya
14. Pendidik Sebaya
15. Pameran

Uji coba pelaksanaan program ini pertama kali dilakukan di Yogyakarta pada Tahun 2012. Kemudian, program ini dikembangkan di 3 kota lain di Indonesia seperti Jambi, Lampung dan DKI Jakarta pada tahun 2013 (WPF, Programmes, 2019).

Selain itu, Rutgers WPF juga bermitra bersama pemerintah agar program pendidikan seksualitas masuk dalam kebijakan pemerintah terkait panduan pendidikan sekolah (kurikulum). Sehingga, akan lebih banyak lagi remaja yang memiliki pengetahuan dan perilaku yang sehat serta menghargai orang lain.

2. Diskusi Komunitas

Tingginya kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data yang dikeluarkan dari Komnas perempuan menunjukkan, kasus kekerasan seksual tahun 2015 yang terlapor sebanyak 321.752 kasus. Data ini meningkat dari data tahun 2014 sebanyak 293.220 kasus (WPF, Programmes, 2019). Sehingga,

program *Prevention+* ini bertujuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Program ini juga dijalankan untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dengan pendekatan pelibatan laki-laki sebagai agen perubahan. Selain itu dengan pelibatan kelompok laki-laki diharapkan dapat lebih menginformasikan nilai maskulinitas yang positif berdasarkan nilai kesetaraan dan nonkekerasan. Program ini berjalan di tingkat lokal seperti di Yogyakarta dan Lampung dan di tingkat nasional seperti kegiatan advokasi di Jakarta. Rutgers WPF Indonesia melakukan intervensi program di beberapa level untuk mencapai tujuannya, yaitu individu, komunitas, institusi, dan pemerintah. Dalam program ini Rutgers WPF bermitra dengan beberapa LSM lokal seperti Damar, Rifka Annisa, Rahima, dan Yayasan Pulih.

3. Program Pelibatan Kelompok Pria

Rutgers WPF dalam implementasi programnya memiliki tujuan yang berkaitan dengan feminis sosialis dimana menekankan perempuan dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis yang selama ini digambarkan dalam posisi rendah. Tujuan tersebut yaitu untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dengan pendekatan pelibatan laki-laki. Seperti dalam program *MenCare+* yang melibatkan laki-laki sebagai aktor perubahan. Selama ini perempuan selalu ditempatkan di dalam rumah untuk mengurus anak hingga tidak diperbolehkan bekerja. Perempuan dianggap lemah dan selalu mengedepankan perasaan. Sehingga sering kali dinomorduakan

bahkan ditempatkan pada posisi yang rendah di dunia kerja. Maka program ini dijalankan agar laki-laki dapat mengubah pandangan kesehariannya, dari diskriminatif terhadap perempuan hingga lebih menghargai relasi, bersikap adil, dan mendukung kesetaraan.

MenCare+ adalah program global yang sudah diimplementasikan tiga tahun sejak 2013, dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Program ini diselenggarakan di empat negara yaitu Indonesia, Brazil, Afrika Selatan dan Rwanda. Program ini diluncurkan Rutgers WPF Indonesia dalam upaya berpartisipasi menghapus kekerasan berbasis gender dan seksualitas terhadap perempuan. Dengan melibatkan laki-laki sebagai aktor perubahan, program ini memiliki enam kegiatan yaitu :

- a. Pendidikan bagi remaja laki-laki
- b. Pendidikan bagi kelompok ayah.
- c. Kampanye laki-laki Peduli di komunitas
- d. Pemberian informasi mengenai kontrasepsi
- e. Pelatihan di bidang pelayanan kesehatan
- f. Konseling bagi laki-laki pelaku KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Dengan kegiatan ini perubahan utama yang diharapkan seperti, semakin banyak laki-laki dapat menerapkan nilai-nilai maskulinitas yang positif, menurunkan angka kekerasan berbasis gender, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi serta kesehatan ibu dan anak. Hasil dari survei *International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)* yang dilakukan di Brazil, Chili,

Kroasia, India, Meksiko dan Rwanda pada tahun 2011 menunjukkan bahwa tindak kekerasan adalah sesuatu yang dipelajari oleh laki-laki dari kecil dan kekerasan dianggap sebagai suatu tindakan yang wajar (WPF, Programmes, 2019).

Melalui program *MenCare+* para kelompok remaja laki-laki dan ayah juga diingatkan tentang undang-undang anti kekerasan dan undang-undang perlindungan anak yang harus dipatuhi. Hal ini dilakukan agar kelompok laki-laki juga dapat ikut serta menyebarkan informasi tentang pentingnya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melihat kondisi yang ada di Indonesia, Rutgers WPF dalam menjalankan Program *MenCare+* menyadari bahwa para laki-laki belum sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang apa yang harus dilakukan bahkan sering tidak dapat menahan diri sehingga mudah melakukan kekerasan. Oleh karena itu serangkaian kegiatan diberikan kepada kelompok remaja laki-laki dan kelompok ayah. seperti kegiatan menyebarkan pengetahuan, kegiatan konseling dan kegiatan terapi. Konseling dan terapi sangat dibutuhkan bagi mereka yang memiliki kecenderungan melakukan kekerasan.

Dalam rangka menyediakan sumber informasi yang tetap dan berlangsung lama, program *MenCare+* mengadakan peningkatan kapasitas bagi para petugas kesehatan di pusat-pusat pelayanan kesehatan seperti klinik dan puskesmas untuk mampu memberikan pelayanan (informasi, konseling dan terapi) terkait kekerasan berbasis seksualitas dan gender serta hak dan kesehatan

seksual dan reproduksi, termasuk perlindungan anak dan kesehatan ibu. Inisiatif ini diharapkan dapat disesuaikan dan diterapkan dalam sistem layanan kesehatan publik secara nasional.

Menurut Rutgers WPF, dalam program *MenCare+* + memiliki ukuran kualitas laki-laki dari yang paling buruk sampai yang paling ideal. Ukuran kualitas tersebut diantaranya :

1. Eksploitatif
2. Netral
3. Sensitif
4. Transformatif

B. Kegiatan Advokasi

Rutgers WPF dalam menangani SGBV terhadap perempuan di Indonesia juga melalui kegiatan advokasi dengan menggunakan strategi *information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics*.

1. Strategi Information Politics

Strategi *information politics* merupakan strategi yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan menyediakan data bagi masyarakat serta mendramatisir fakta melalui bagai pernyataan-pernyataan korban dan sebagainya sehingga menarik perhatian. Rutgers WPF dalam hal ini melakukan pendataan dari berbagai sumber dan mengadakan penelitian muda untuk memperoleh bukti yang sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan.

2. Strategi symbolic politics

Strategi ini dilakukan dengan mengadakan ceremony, peringatan kejadian atau hari-hari istimewa yang terkait dengan isu yang diperjuangkan sehingga masyarakat memperhatikan isu tersebut. Rutgers WPF dalam strategi menjalankan perannya

selalu melibatkan sebuah aksi sebagai bentuk dukungan dalam memperingati hari-hari penting seperti Hari Perempuan Sedunia, Hari AIDS Sedunia, dan peringatan lainnya yang berkaitan dengan fokus NGO ini.

3. Strategi *leverage politics*

Strategi *leverage politics* digunakan untuk memperkuat dan memperluas jaringannya serta melibatkan dukungan dengan cara menggandeng organisasi internasional maupun mitra lokal yang memiliki *power* lebih besar dan aktor yang lebih kuat. Rutgers WPF dalam implementasi program tidak berjalan secara individu, melainkan selalu menggandeng mitra dan jaringan kerja, seperti Yayasan Pulih, Rifka Anisa, Rahima, Damar, PKBI, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, hingga UNFPA. Selain itu, untuk memperkuat daya dan dukungan kepada pemerintah, Rutgers WPF juga berpartisipasi aktif bersama mitra dalam mendukung kinerja dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan dan perhatian terhadap persoalan terkait HKSR dan SGBV.

4. Strategi *accountability politics*

Strategi ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan dengan mengingatkan kepada pemerintah agar dapat dengan bijak mempertanggungjawabkan sebuah kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Rutgers WPF sebagai gerakan sosial juga melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi (*monev*) atas dukungan yang telah diberikan pemerintah terhadap program yang berjalan. *Monev* yang dilakukan seperti monitoring pengajaran modul SETARA ke sekolah yang telah diberikan modul tentang seksualitas untuk siswa SMP.

Kesimpulan

Rutgers *World Population Foundation* (WPF) merupakan salah satu dari beberapa organisasi internasional di dunia yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menghapuskan segala bentuk kekerasan bagi perempuan di seluruh dunia. Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, Rutgers membutuhkan banyak dukungan besar dari masyarakat internasional maupun lokal. Baik itu, pemerintah, pihak swasta maupun organisasi-organisasi internasional lainnya.

Melihat kondisi di Indonesia dalam kasus kekerasan seksual berbasis gender, secara langsung perempuan terlibat didalamnya, karena perempuan merupakan bagian utama dari pihak yang dirugikan. Perempuan digambarkan dalam posisi yang rendah dan tidak istimewa sehingga sangat rentan mengalami segala bentuk kekerasan. Rutgers WPF bertujuan untuk membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta terpenuhinya Hak-hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR). Kasus SGBV yang ada di Indonesia sudah berlangsung lama dan terus mengalami peningkatan angka disetiap tahunnya. Seperti kekerasan terhadap perempuan (KtP) pada tahun 2012 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2015. Kenaikan angka disetiap tahunnya ini adalah jumlah kasus KtP yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan sangat memungkinkan untuk bisa lebih tinggi seperti halnya fenomena gunung es. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlapor oleh Komnas perempuan merupakan jumlah kasus yang terlihat di permukaan saja. Masih banyak kasus KtP yang tidak terlapor hingga saat ini karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Selain itu, karena adanya sikap permisif di masyarakat maka banyak perempuan yang tidak sadar bahwa dirinya

telah mengalami maupun menjadi salah satu korban dari SGBV.

Berbagai dampak dan masalah-masalah yang diterima oleh perempuan pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia membuat Rutgers WPF menjalankan peran dan strateginya untuk mengatasi masalah dan dampak tersebut. Rutgers WPF telah membentuk dan melaksanakan program-program kerja untuk mencapai targetnya dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dengan menjalankan fungsi informatif dan operasional. Dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan, Rutgers WPF melakukan pengumpulan data dan analisa data terhadap korban-korban pelecehan seksual dengan tujuan masyarakat internasional dan masyarakat di Indonesia khususnya, sadar bahwa hak-hak perempuan memang harus di lindungi.

Kemudian dalam menunjang programnya, Rutgers WPF juga memberikan bantuan program-program yang juga di dukung oleh organisasi internasional lainnya dan organisasi lokal bagi remaja dan perempuan seperti pemberian pendidikan yang komprehensif, perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok marginal, serta pelayanan kesehatan. Melihat beberapa kontribusi yang dilakukan oleh Rutgers WPF bersama dengan masyarakat internasional maupun lokal. Baik itu, pemerintah, pihak swasta maupun organisasi internasional menjadi langkah yang baik untuk meminimalisir angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya jumlah kasus KtP pada tahun 2016. Dengan begitu, disini terlihat bahwa terjadi perubahan jumlah angka kasus KtP pada tahun 2015 sebanyak 321.752 kasus menjadi 259.150 kasus di tahun 2016 setelah Rutgers WPF menjalankan programnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Aziza, N. (2013). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY & Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ihromi, T. (1995). *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jihaa.nl.(2017). *Empowering Young People Towards Happy and Healthy Lives*. Utrecht: Zwaan Printmedia

E-book

Agger, B. (2003). *Teori Sosial Kritis*. Yogyakarta: Kerasi Wacana.

Agustino, L. (2007). *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Azis, A. (2007). *Feminisme Profetik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Brown, C. *Critical Theory and Postmodernism in International Relations in; AJR Groom & Margot Light (eds.), Contemporary International Relations: A Guide to Theory*. 1994: Pinter.

Devetak, R. (2001). *Postmodernism in; Scott Burchil, et al, Theories of International Relations*. Palgrave.

Jackson, S., & Jones, J. (2009). *Pengantar Teori--Teori Feminis Kontemporer*. Yogyakarta: JALASUTRA.

Perempuan, K. (2017). *15 Bentuk Kekerasan*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.

Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.

Saptari, R. (1997). *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Trimayuni, S. A. (2013). *Gender dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: JALASUTRA.

Weber, C. (2005). *International Relations Theory, A Critical Introduction*. Routledge.

E-Jurnal

P, U. Z., K, R. A., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Arsetif. *Jurnal Universitas Padjadjaran* .

Widianingrum, F. (2017). Pelecehan Seksual terhadap Anak. *UMY Repository* .

Yulia, R. (2012). Gender Based Violence in International Relations. *Jurnal Universitas Riau*.

Website

Ariyanto.(2019, April 25). *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*. October Monday, 2019, retrieved from indopos.co.id: <http://indopos.co.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/amp/>

DR.Ir. Adhi Santika, PhD. (2007, Maret). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan*. November Saturday, 2019, retrieved from Badan Pembinaan Hukum Nasional: <http://bphn.go.id>

Jauhariyah, W. (2016, July 14). Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. November Thursday, 2019, retrieved from Jurnal Perempuan: <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>

Komnas Perempuan.(2013, March).
Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2013.
Desember Monday, 2019, retrieved from
KOMNAS Perempuan:
<http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2013>

Komnas Perempuan.(2014, March).
Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2014.
Desember Monday, 2019, retrieved from
KOMNAS Perempuan:
<http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2014>

Komnas Perempuan.(2015, March).
Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2015.
Desember Monday, 2019, retrieved from
KOMNAS Perempuan:
<http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2015>

Komnas Perempuan.(2016, March).
Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2016.
Desember Monday, 2019, retrieved from
KOMNAS Perempuan:
<http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2016>

Komnas Perempuan.(2017, March).
Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2017.
Desember Monday, 2019, retrieved from
KOMNAS Perempuan:
<http://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>

Rutgers WPF. (2018). *Rutgers WPF Indonesia*. Retrieved from rutgers.id:
<http://rutgers.id/siapa-kami/tentang-kami>

Rutgers WPF. (2018). *Rutgers WPF Indonesia*. Retrieved from rutgers.id:

<http://rutgers.id/fokus-kami/pendidikan-seksualitas-komprehensif/>

Rutgers WPF. (2018). *Rutgers WPF Indonesia*. Retrieved from rutgers.id:
<http://rutgers.id/fokus-kami/kekerasan-berbasis-gender/>

Rutgers WPF. (2018). *Rutgers WPF Indonesia*. Retrieved from rutgers.id:
<http://rutgers.id/fokus-kami/layanan-ramah-remaja/>

Rutgers WPF (2019). *Programmes*.
November Sunday 2019 Retrieved from
Rutgers for sexual and reproductive health
and rights:
<http://rutgers.international/programmes>

Rutgers WPF (2019). *What we do*.
November Sunday 2019 Retrieved from
Rutgers for sexual and reproductive health
and rights:
<http://rutgers.international/what-we-do>